

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Secara geografis Gibraltar terletak di pintu masuk Laut Mediterania. Gibraltar memiliki luas 68 km² (26 mil²). Gibraltar dihuni oleh gabungan dari berbagai bangsa. Kebanyakan penduduk Gibraltar berbahasa Inggris dan Spanyol, dan campuran Genoa dan memiliki keturunan Inggris, Spanyol, Malta dan Portugis, dari sisi ekonomi Gibraltar sangat bergantung pada pariwisata, jasa keuangan, dan perkapalan. Saat ini terdapat juga pekerja migran dari Maroko. Penduduk Gibraltar adalah warga negara Inggris. Mereka memilih perwakilan sendiri untuk di House of Assembly; raja Inggris menunjuk seorang gubernur (Gibraltar Profiles: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/3851047.stm. Diakses 13 september 2014. Pukul 12:00 WIB). Walaupun telah berada di bawah *British Overseas Territories*, Gibraltar masih menjadi perebutan antara Inggris dengan Spanyol.

Bagi Inggris posisi Gibraltar sangatlah strategis karena merupakan bagian maritim sangat penting bagi navigasi maritim di dunia, Gibraltar menghubungkan Laut Mediterania dengan Samudera Atlantik dan benua Eropa dengan Afrika. Lebih dari seperempat dari transit lalu lintas maritim global melalui selat setiap tahun. Gibraltar pada tahun 2011 memberikan kontribusi dalam upaya intervensi NATO di Libya. Fungsi Gibraltar sebagai pangkalan militer terutama berasal dari letak geografinya yang strategis. Pada tahun 1904 Sir John "Jackie" Fisher, mantan Laksamana Armada Royal Navy, mengungkapkan bahwa Gibraltar sebagai "*one of the five keys that lock up the world*". Semua kapal yang memasuki atau meninggalkan Mediterania dari Samudra Atlantik harus melewati Selat Gibraltar. Gibraltar adalah salah satu pangkalan militer Inggris yang berfungsi sebagai pangkalan operasi penting bagi militer Inggris. Gibraltar juga menjadi pemasok amunisi dan perlengkapan untuk pesawat terbang dan kapal yang menuju Afrika dan

Timur Tengah. Pelabuhan Gibraltar menyediakan area *docking* yang aman untuk kapal selam bertenaga nuklir. Gibraltar juga menjadi tempat pertukaran informasi intelijen, sebab letaknya yang menghubungkan Afrika dan Eropa serta menjadi jalur perdagangan yang melewati Selat Gibraltar (Luke Coffey 2014, hlm.9).

Gibraltar menjadi penting untuk dasar kekuatan Inggris dalam menjaga pintu masuk melalui Selat Gibraltar dan menutupi cekungan barat Mediterania. Gibraltar adalah titik untuk perakitan dan perbaikan kapal perang Royal Navy, atau mengangkut pasukan, peralatan dan perlengkapan menuju daerah konflik lainnya di Timur Tengah dan Mediterania. Gibraltar memiliki tangki bahan bakar, dan depot amunisi di dalam gua-gua jauh di dalam batu, perlengkapan ini bertujuan untuk membantu pergerakan pasukan Inggris ke dan dari wilayah Mediterania dan Timur Tengah (British Royal Navy 2013, hlm.8).

Status kepemilikan Gibraltar telah diperebutkan sejak tahun 1704, saat pasukan gabungan Inggris dan Belanda melakukan invasi ke Gibraltar selama Perang Suksesi Spanyol. Kota ini, beserta kastil, pelabuhan, dan pertahanannya, diserahkan kepada Inggris tanpa syarat setelah kekalahan Spanyol, dibawah Traktat Utrecht tahun 1713. Pada tahun 1954, ketika Ratu Elizabeth II mengunjungi Gibraltar sebagai bagian dari Tur Commonwealthnya, Spanyol mulai mengambil langkah-langkah agresif. Hal ini disebabkan karena, hadirnya Ratu di wilayah Gibraltar memberikan arti simbolik bahwa wilayah Gibraltar telah berada di bawah kedaulatan Inggris. Spanyol mengajukan tuntutan atas Gibraltar kepada PBB untuk pertama kalinya pada bulan Desember di 1967. Spanyol mengacu pada integritas teritorial dan menunjukkan fakta bahwa semenanjung Gibraltar berada di dalam daratan Spanyol. Spanyol juga berpendapat bahwa latar belakang sejarah membuktikan klaim yang sah ("The Issue of Gibraltar's Sovereignty and Spain's Territorial Integrity. What could Spain do to Resolve the Gibraltar Problem?" 2013, hlm. 43). Pada tanggal 8 Juni 1969, Spanyol memerintahkan penutupan pos bea cukai, layanan feri dari Algeciras ke Gibraltar dihentikan, larangan terbang di atas wilayah udara Spanyol dari Gibraltar dan penutupan perbatasan antara Spanyol dan Gibraltar di La Línea. Blokade Spanyol

atas Gibraltar ini merupakan yang terlama sepanjang sejarah konflik antara Inggris dengan Spanyol (Peter Gold 2005, hlm.20).

Kebijakan ini bermaksud untuk mengisolasi Gibraltar dan membuat Gibraltar bertekuk lutut karena mandoknya kegiatan ekonomi dan mengakibatkan transfer tak terelakkan dari Gibraltar ke Spanyol sebagai satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Namun pada kenyataannya secara ekonomi Gibraltar dapat bertahan, karena dukungan dan bantuan dari Pemerintah Inggris. Tindakan ini malah membuat Spanyol kurang mendapat dukungan dalam NATO maupun dalam komunitas Eropa sendiri (Peter Gold 2005, hlm.21).

Walaupun Gibraltar telah menjadi salah satu *British Overseas Territories*, Spanyol tetap berusaha untuk mengklaim kembali wilayah ini dari tangan Inggris. Pada bulan November 2011, Perdana Menteri Spanyol yang baru Mariano Rajoy menginginkan agar Trilateral Forum antara Inggris, Gibraltar dan Spanyol segera diakhiri dan meminta Inggris untuk mengadakan pembicaraan bilateral dengan Spanyol tentang kedaulatan atas Gibraltar. Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Garcia-Margallo sudah lama mengecam status Gibraltar. Ia menyatakan tidak akan mengunjungi Gibraltar, selama bendera Spanyol tidak berkibar di wilayah itu (<http://www.dw.de/>. 13 September 2014. Pukul 12:30 WIB). Sejak Perdana Menteri Spanyol yang baru Mariano Rajoy berkuasa telah terjadi berbagai aksi yang dilakukan oleh nelayan, kapal Guardia Sipil, Kapal Penelitian dan bahkan Angkatan Laut Spanyol yang masuk ke wilayah perairan Gibraltar.

Gibraltar dan Inggris menganggap bahwa wilayah perairan Gibraltar diperpanjang sejauh tiga mil dari garis pantai Gibraltar sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Sementara, Spanyol menegaskan bahwa Perjanjian Utrecht tidak menyerahkan perairan pantai Gibraltar kepada Inggris. Pemahaman yang berbeda inilah yang menyebabkan berbagai serangan yang dilancarkan oleh kapal Spanyol ke dalam wilayah perairan Gibraltar. Serangan oleh kapal Spanyol telah lama menjadi sumber ketegangan antara Inggris dengan Spanyol, ketegangan ini meningkat sejak tahun 2012.

Selain sengketa nelayan yang masuk mencari ikan di wilayah perairan Gibraltar, kapal pemerintah Spanyol (missalkan Guardia Civil dan kapal penelitian atau bahkan kapal angkatan laut) juga melakukan serangan ke wilayah perairan laut Gibraltar. Tujuannya adalah untuk menunjukkan suatu bentuk kontrol dan penolakan terhadap kedaulatan Inggris atas wilayah perairan Gibraltar. Sebagai contoh, pada tanggal 19 November 2013, kapal penelitian pemerintah Spanyol memasuki perairan Gibraltar dan menolak perintah dari Royal Navy untuk keluar. Kapten kapal tersebut mengatakan tindakan ini dalam rangka untuk melakukan penelitian oseanografi untuk kepentingan masyarakat Eropa atas perintah pemerintah Spanyol. Kapal Penelitian Spanyol tersebut akhirnya meninggalkan daerah itu setelah hampir 24 jam. Pada tanggal 19 Februari 2014, sebuah kapal perang Spanyol memasuki perairan sekitar Gibraltar sehingga mengganggu pasukan Inggris yang sedang melakukan latihan parasut. Peringatan yang dikeluarkan oleh kapal Royal Bavy untuk kapal perang Spanyol tersebut tidak digubris sama sekali (Authority of the House of Commons London 2014, hlm.20).

Inggris telah menempatkan Royal Navy di Gibraltar dengan tujuan mempertahankan operasi lini depan skuadron kecil di Gibraltar untuk berkontribusi dalam pertahanan maritim dan keamanan dan jika perlu, melakukan operasi maritim ofensif. Royal Navy juga telah menggunakan helikopter rendah di atas kapal yang masuk secara ilegal ke dalam wilayah Gibraltar untuk mengusir mereka keluar dari wilayah perairan Gibraltar. Gibraltar juga bertindak sebagai pangkalan angkatan laut untuk kapal perang dan kapal selam dalam perjalanan ke dan dari penyebaran di Teluk atau Afrika, dan menerima kunjungan rutin dari kapal-kapal Inggris setiap tahun. Kehadiran kapal Royal Navy di Gibraltar dapat mencegah masuknya kapal-kapal Spanyol ke dalam wilayah Gibraltar dan juga menunjukkan kekuatan militer Inggris kepada Spanyol. Gubernur Gibraltar menyatakan bahwa peningkatan kehadiran militer di Gibraltar akan memberikan jaminan keamanan kepada Gibraltar serta efek jera bagi kapal-kapal Spanyol (Authority of the House of Commons London 2014, hlm.45).

Saat ini Gibraltar telah dijadikan sebagai pangkalan utama bagi Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Royal Navy mempertahankan operasionalnya di Gibraltar untuk berkontribusi dalam pertahanan maritim dan keamanan dan, jika perlu, melakukan tindakan ofensif. Pada bulan Februari 2014 Inggris mengerahkan personil tambahan ke Gibraltar untuk meningkatkan kemampuan respon dan ketahanan Royal Navy Gibraltar Squadron (Authority of the House of Commons London 2014, hlm.48). Pemerintah Inggris menyatakan bahwa aset besar di Gibraltar tidak dikerahkan secara agresif, tetapi hanya digunakan untuk menunjukkan bahwa perairan ini adalah perairan Inggris. Tujuannya adalah menunjukkan kepada Spanyol bahwa kehadiran militer Inggris di Gibraltar masih ada dan juga agar Spanyol tidak bersikap agresif.

I.2 Rumusan Masalah

Spanyol di bawah pemerintahan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy, Spanyol mulai secara bertahap melakukan negosiasi ulang dengan Inggris terkait status kepemilikan Wilayah Gibraltar, walaupun Gibraltar telah masuk ke dalam *British Overseas Territories*. Inggris tentu tidak ingin kehilangan Gibraltar, sebab Gibraltar selama ini telah dijadikan Pangkalan militer bagi Royal Navy dan pelatihan serta pertukaran informasi intelijen Inggris. Gibraltar juga secara geografis sangat strategis sebab berada di antara benua Eropa dan Afrika dan menjadi jalur perdagangan dari Amerika Serikat, Kanada, Negara-negara Afrika Barat dan Amerika Tengah menuju Eropa Selatan dan Eropa Timur. Jadi dalam kasus ini kepentingan Inggris sangat dipertaruhkan, jika kehilangan Gibraltar. Oleh sebab itu pertanyaan yang perlu dijawab penulis dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Strategi Pertahanan Inggris Atas Wilayah Gibraltar dari Ancaman Spanyol (2011-2014)”?**

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menggambarkan krisis yang terjadi antara Inggris dengan Spanyol terkait klaim kedaulatan Spanyol atas wilayah Gibraltar.

- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan tentang strategi pertahanan Inggris untuk menghadapi Spanyol di wilayah Gibraltar.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan data dalam Studi Hubungan Internasional yang memiliki keterkaitan dengan kasus antara Inggris dengan Spanyol terkait wilayah Gibraltar.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan strategi pertahanan Inggris.

I.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini akan dibagi ke dalam tiga bagian sesuai dengan tema besar yang penulis ambil. Pertama; Geopolitik Gibraltar, penulis melihat geopolitik sebagai permasalahan utama yang menyebabkan Inggris dengan Spanyol bersitegang di wilayah Gibraltar. Wilayah Gibraltar telah menjadi zona perebutan pengaruh dan kekuasaan antara Inggris dengan Spanyol, wilayah ini memiliki jalur perdagangan dan jalur komunikasi yang menghubungkan wilayah Afrika Utara dengan Eropa. Oleh sebab itu kajian geopolitik sangat diperlukan untuk menunjukkan bahwa karya tulis ini memiliki kontribusi terhadap pengaruh geopolitik Gibraltar terhadap Inggris khususnya dan dunia Internasional pada umumnya.

Kedua, strategi, jika sebuah negara melakukan hubungan dengan negara lain, entah hubungan diplomasi ataupun militer, strategi merupakan keniscayaan. Oleh sebab itu untuk menganalisis karya tulis ini, buku-buku yang bertemakan strategi turut dibahas untuk membantu kelancaran penulisan karya tulis ini. Ketiga adalah konflik yang terjadi antara Inggris dengan Spanyol dalam memperebutkan wilayah Gibraltar. Mustahil dapat menganalisis konflik yang terjadi antara Inggris dengan Spanyol terkait permasalahan Gibraltar tanpa menampilkan literatur yang menulis tentang permasalahan yang terjadi. Oleh sebab itu penulis juga menampilkan buku-

buku atau jurnal yang menulis tentang konflik yang terjadi antara Inggris dengan Spanyol terkait permasalahan Gibraltar.

I.5.1 Peter Gold. 2010. *Identity formation in Gibraltar: Geopolitical, historical and cultural factors*. University of the West of England.

Perspektif geopolitik Gibraltar secara signifikan mulai berubah dengan pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869, namun selama Perang Dunia Pertama pengembangan kapal selam U-boat menambah nilai strategis Gibraltar sebagai cara untuk mencegah musuh memasuki atau meninggalkan Mediterania. Gibraltar memiliki posisi geografis yang penting selama Perang Dunia II, setelah Churchill memutuskan untuk membuat Mediterania menjadi titik fokus perang. Gibraltar menjadi dasar untuk armada angkatan laut yang bertugas menjaga rute terbuka ke Timur Tengah, mengganggu pasokan Jerman di Afrika. Selain itu lapangan udara kecil dibangun di Gibraltar untuk menampung ratusan pesawat tempur dan squadron anti-kapal selam. Gibraltar lebih berguna bagi Inggris dan sekutunya selama tahun 1940-1945 daripada tahun 1713.

Penggunaan Gibraltar sebagai fasilitas militer telah berkontribusi terhadap kekalahan kekuatan Poros dan juga telah menggarisbawahi nilai strategis Gibraltar pada tahun 1940-an. Sejak saat itu signifikansi geopolitik Gibraltar telah menonjol baik untuk Inggris dan lebih luas untuk sekutunya NATO. Selama Perang Dingin, Gibraltar bertindak sebagai pos pengawasan baik untuk Royal Navy maupun pesawat pengintai, sementara perang di Atlantik Selatan atas Falklands/Malvinas, Gibraltar berperan sebagai basis pasokan amunisi dan perlengkapan untuk pasukan Inggris. Juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa “Gibraltar sangat penting ke depan sebagai basis operasional” bagi militer Inggris dalam jarak seribu mil dari wilayah Inggris. Meskipun strategi tradisional mengerahkan kapal, pesawat dan pasukan telah berubah dalam beberapa kali, kebutuhan untuk unit respon cepat bisa dibilang membuat nilai strategis Gibraltar sangat signifikan (Peter Gold 2010, hlm.5-7).

I.5.2 James Rogers and Luis Simón. 2009. *The Status And Location Of The Military Installations Of The Member States Of The European Union And Their Potential Role For The European Security And Defence Policy (Esdp)*.

Strategi pertahanan sangat penting bagi sebuah negara dalam menghadapi negara lain. Strategi pertahanan bertujuan untuk menghadapi setiap ancaman yang dapat membahayakan kepentingan politik, ekonomi dan keamanan setiap negara. Strategi sangat erat kaitannya dengan faktor geografis baik laut, darat maupun udara, karena semua kepentingan politik berasal dari faktor geografis, sumber daya alam dan jalur komunikasi dan informasi. *British Overseas Territory* memiliki lima fungsi strategis inti yaitu fungsi antisipasi, pencegahan, deterrence, perlindungan dan intervensi (James Rogers and Luis Simón 2009, hlm.14). Kelima strategi inti ini bertujuan untuk menghadapi setiap ancaman yang mengancam kepentingan nasional Inggris di seluruh dunia.

Wilayah Gibraltar memiliki posisi yang strategis karena merupakan pintu masuk barat ke Laut Mediterania dan menyediakan pos pementasan yang sangat baik untuk penyebaran militer Inggris ke pesisir Afrika Utara dan Atlantik Selatan. Inggris kini memiliki 330 personel secara permanen ditempatkan di Gibraltar. Wilayah ini mencakup stasiun udara, R.A.F. Gibraltar, serta galangan kapal Royal Navy. Pangkalan militer di Gibraltar sering digunakan sebagai pos pementasan untuk pasukan Inggris bergerak dari Inggris ke Laut Mediterania dan ke luar melalui terusan suez, serta untuk kapal angkatan laut Inggris dan pesawat tempur yang bergerak turun ke Atlantik Selatan. The Royal Navy memiliki dua kapal patroli kecil yang ditempatkan di pelabuhan, meskipun kapal yang jauh lebih besar sering berada di galangan kapal, termasuk kapal induk dan kapal selam nuklir (James Rogers and Luis Simón. 2009, hlm. 15).

James Rogers dan Luis Simón menulis tentang wilayah strategis Inggris di seluruh dunia dan pengaruhnya terhadap strategi pertahanan Inggris khususnya dan Uni Eropa pada umumnya. Wilayah-wilayah ini memiliki fungsi strategis bagi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Inggris dan Uni Eropa. Permasalahan yang penulis

bahas hanya menggunakan Inggris sebagai aktor utama dan strategi pertahanan Inggris dalam melindungi wilayah Gibraltar terhadap Spanyol. Penulis melihat wilayah Gibraltar sebagai salah satu *British Overseas Territory* sebagai wilayah strategis yang diperebutkan oleh Inggris dengan Spanyol sementara James Rogers and Luis Simón melihat wilayah ini sebagai potensi untuk mendukung langkah strategis yang diambil oleh Uni Eropa dan Inggris (James Rogers and Luis Simón. 2009, hlm.16).

I.5.3 Valeri Modebadze. 2013. *The Issue Of Gibraltar's Sovereignty And Spain's Territorial Integrity. What Could Spain Do To Resolve The Gibraltar Problem?*

Gibraltar tetap menjadi masalah pelik dalam hubungan Inggris-Spanyol sejak 1713, ketika Spanyol kehilangan kendali daerah ini dan menyerahkan ke Inggris di bawah syarat-syarat perjanjian dari Utrecht. Perjanjian Utrecht mengakhiri perang suksesi Spanyol, yang dimulai setelah kematian tanpa anak Charles II, pada 1701 dan berlanjut sampai 1713. Gibraltar, yang sebenarnya adalah batu kecil, tetap menjadi isu yang sangat sensitif dan emosional di Spanyol, serta di Inggris (“The Issue Of Gibraltar's Sovereignty And Spain's Territorial Integrity. What Could Spain Do To Resolve The Gibraltar Problem?” 2013, hlm.43). Karena ukurannya yang kecil, Gibraltar bukanlah suatu keharusan masuk ke wilayah Spanyol, juga tidak memiliki makna ekonomi atau strategis besar. Sebaliknya, Gibraltar merupakan makna simbolis yang kuat untuk Spanyol. Ini adalah banderilla, atau duri di sisi kebanggaan Spanyol, dan kembalinya Gibraltar adalah masalah prinsip. Sifat keras dari konflik atas Gibraltar berasal justru dari asumsi dasar setiap negara: sifat tak terpisahkan dari kedaulatan dan wilayah (“The Issue Of Gibraltar's Sovereignty And Spain's Territorial Integrity. What Could Spain Do To Resolve The Gibraltar Problem?” 2013, hlm.44).

Ketika tahun 1967 referendum mengungkapkan bahwa sebagian besar Gibraltarians ingin tetap berada di bawah kekuasaan Inggris, Franco (Diktator Spanyol) memutuskan untuk menutup perbatasan dengan Gibraltar. Keputusannya

untuk menutup perbatasan dan memaksakan blokade pada Gibraltar ternyata menjadi kesalahan, hal ini membuat masyarakat Gibraltar semakin menjauh dari Spanyol. Blokade tidak membantu Spanyol untuk mendapatkan kembali kontrol atas Gibraltar, sebaliknya hanya memperburuk masalah. Setiap negosiasi dan upaya untuk memecahkan masalah Gibraltar tidak produktif sampai Spanyol kembali ke system demokrasi (“The Issue Of Gibraltar’s Sovereignty And Spain’s Territorial Integrity. What Could Spain Do To Resolve The Gibraltar Problem?” 2013, hlm.45). Permasalahn penutupan perbatasan antara Spanyol dengan Gibraltar tidak termasuk dalam penelitian yang akan saya bahas nanti.

Sejak itu, pemerintah kedua negara telah mencoba berkali-kali untuk memulai negosiasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa Gibraltar. Namun negosiasi antara pemerintah Spanyol dan Inggris selalu menemui jalan buntu dan isu Gibraltar tetap belum terpecahkan, karena pemerintah Spanyol terus menganggap masalah Gibraltarian sebagai masalah bilateral antara Inggris dan Spanyol dan tidak memperhitungkan kepentingan Gibraltarians. Pemerintah Spanyol ingin membangun kembali integritas wilayah kerajaan Spanyol. Bagi pemerintah Gibraltar persatuan nasional Spanyol tidak dapat diterima, karena Gibraltarians tidak ingin kehilangan status istimewa mereka. Pada tanggal 18 Maret 2002 demonstrasi besar-besaran diadakan di Gibraltar, di mana 25.000 orang berpartisipasi. Mereka dengan suara bulat menolak konsep “kedaulatan bersama” yang ditawarkan oleh Inggris dengan Spanyol, namun pada saat yang sama masyarakat Gibraltar menyatakan keinginan mereka untuk memperbaiki hubungan dengan Spanyol dan menjalin hubungan bertetangga baik dengan Spanyol (“The Issue Of Gibraltar’s Sovereignty And Spain’s Territorial Integrity. What Could Spain Do To Resolve The Gibraltar Problem?” 2013, hlm.46).

Pangkalan militer Inggris di Gibraltar bagi Spanyol dapat menjadi ancaman. Dalam istilah militer, Gibraltar tidak lagi penting di masa damai namun akan berguna dalam konflik. Spanyol khawatir setiap operasi militer Inggris di Gibraltar ataupun keterlibatan militer Inggris akan membahayakan tidak hanya Gibraltar, tetapi juga seluruh Spanyol Selatan. Ketakutan ini agak berlebihan karena tidak ada kapal militer

besar maupun pesawat militer secara teratur berbasis di sana, dan galangan kapal Royal Navy telah berubah menjadi fasilitas komersial untuk tujuan sipil. Namun, markas militer yang tertinggal di dalam batu di Gibraltar dapat diaktifkan di masa perang, seperti fasilitas untuk kapal berlabuh dan kapal selam. Spanyol terutama takut bahwa Inggris mungkin menggunakan Gibraltar sebagai dasar untuk persenjataan nuklirnya. Spanyol tertarik untuk memperkuat kontrol militer atas selat Gibraltar untuk meminimalkan ancaman yang datang dari pangkalan militer Inggris (“The Issue Of Gibraltar’s Sovereignty And Spain’s Territorial Integrity. What Could Spain Do To Resolve The Gibraltar Problem?” 2013, hlm.45).

Sengketa saat ini antara Spanyol dan Inggris atas status Gibraltar telah terwujud dalam bentuk bentrokan atas hak memancing. Spanyol mengklaim yurisdiksi atas wilayah perairan Gibraltar dan menganggap itu bagian dari wilayah nasional. Ketegangan antara Spanyol dan Gibraltar meningkat pesat ketika Gibraltar memutuskan untuk melanggar perjanjian tahun 1999 dengan serikat nelayan Spanyol yang memungkinkan kapal nelayan Spanyol untuk beroperasi di perairan teritorial Gibraltar. Pemerintah Gibraltar memutuskan untuk menjatuhkan blok beton ke laut untuk menghentikan serangan oleh kapal nelayan Spanyol dan melindungi perairan dari penangkapan ikan berlebihan. Pemerintah Spanyol marah dengan keputusan ini dan memprotes bahwa penciptaan karang bawah laut buatan adalah ilegal dan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Utrecht. Spanyol mengklaim perairan sekitar Batu dan menolak mengakui yurisdiksi Gibraltar di luar batas yang ditetapkan dalam Perjanjian Utrecht. Konflik Spanyol dengan Inggris terkait dengan Gibraltar selalu dipicu dengan masuknya nelayan atau kapal penjaga pantai Spanyol ke wilayah Gibraltar (“The Issue Of Gibraltar’s Sovereignty And Spain’s Territorial Integrity. What Could Spain Do To Resolve The Gibraltar Problem?” 2013, hlm. 48). Spanyol berpendapat bahwa Perjanjian Utrecht membatasi kontrol maritim Inggris ke pelabuhan Gibraltar. Gibraltarians menolak argumen ini dan percaya bahwa wilayah perairan harus didefinisikan sesuai dengan hukum internasional. Pemerintah Spanyol memutuskan untuk menghukum Gibraltarians karena penciptaan terumbu buatan.

Jurnal ini menjelaskan tentang permasalahan territorial laut Gibraltar, pangkalan militer Inggris di Gibraltar dan juga permasalahan kedaulatan atas Gibraltar, untuk sebagian intisari jurnal ini memiliki sumber bagi penulisan karya tulis ini, namun tidak membahas tentang persoalan perbatasan Inggris di Gibraltar. Pertahanan yang penulis maksudkan adalah mengenai strategi yang digunakan oleh Inggris untuk menghadapi Spanyol.

I.5.4 Jacob Lundborg. 2014. *Spain, Gibraltar and Territorial Waters: A New Battleground for an Old Conflict.*

Jacob Lundborg menjelaskan tentang hubungan Spanyol dengan Gibraltar terkait dengan batas territorial laut antara Spanyol dengan Gibraltar. Penelitian yang akan saya lakukan menjelaskan konflik territorial yang terjadi antara Spanyol dengan Gibraltar secara umum. ini hanya digunakan sebagai bahan pendukung penelitian yang akan saya bahas. Jacob Lundborg juga menjelaskan bahwa Konsep kebebasan laut lepas telah lama diakui oleh hukum negara. Gagasan bahwa negara atau penguasa individu memiliki hak untuk menegakkan hukum pada “perairan territorial” telah lama diakui. Pada akhir abad ke-18 definisi wilayah perairan suatu negara hanya diperluas untuk tiga mil. Batas ini sebagian besar diterima sebagai hukum adat hingga akhir Perang Dunia II.

Konflik yang terjadi antara Spanyol dengan Gibraltar juga terjadi karena permasalahan pengadilan Uni Eropa yang menjatuhkan keputusan tentang pengawasan wilayah laut Gibraltar. Konflik persoalan wilayah perairan Gibraltar dimulai ketika Komisi Eropa memberikan Spanyol hak untuk mengawasi zona perlindungan lingkungan laut yang secara tradisional dikenal sebagai perairan nasional Gibraltarian. Namun Keputusan Komisi Eropa ini tidak mengakui kedaulatan Spanyol atas wilayah tersebut. Namun demikian, pemerintah Inggris dan Gibraltar khawatir bahwa pengawasan Spanyol lingkungan di wilayah ini akan melanggar hak-hak kedaulatan Gibraltar untuk mengontrol wilayah Gibraltar (“Spain, Gibraltar and Territorial Waters: A New Battleground for an Old Conflict” 2014, hlm.8).

Inggris dan Spanyol merupakan dua negara besar di Uni Eropa baik dari segi penduduk dan ekonomi. Namun pengadilan Uni Eropa telah memperburuk ketegangan antara Inggris, Gibraltar, dan Spanyol. Pengadilan telah keliru, baik dalam analisis hukum dan kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa. Kegagalan yang paling dasar dari pengadilan Uni Eropa adalah tidak menggunakan konflik ini sebagai sarana untuk memberikan keputusan final tentang status wilayah perairan Gibraltar. Pengadilan Eropa menyatakan bahwa, sebagai masalah hukum Uni Eropa, Gibraltar memiliki klaim ke perairan teritorial dan Komisi Eropa melanggar wilayah Gibraltar dengan memberikan wewenang kepada Spanyol untuk mengawasi lingkungan perairan Gibraltar (“Spain, Gibraltar and Territorial Waters: A New Battleground for an Old Conflict” 2014, hlm. 10). Sisa dari catatan ini akan menganalisis klaim masing-masing negara untuk perairan teritorial Gibraltar dan itu akan menentukan sisi yang memiliki klaim yang lebih kuat. Persoalan sengketa di pengadilan Uni Eropa tidak dibahas dalam karya tulis yang akan saya bahas.

Jacob Lundborg berbicara seputar sengketa wilayah antara Spanyol dengan Gibraltar, dimulai dengan kuasa yang diberikan oleh Komisi Eropa kepada Spanyol untuk melakukan pengawasan ekologis di lepas pantai Gibraltar. Jacob Lundborg berpendapat bahwa Komisi Eropa salah dalam menempatkan bidang tertentu ini wilayah perairan Gibraltar di bawah kekuasaan Spanyol. Pengadilan Eropa keliru dalam masalah hukum dan kebijakan menolak untuk menyelesaikan masalah ini di pengadilan (“Spain, Gibraltar and Territorial Waters: A New Battleground for an Old Conflict” 2014, hlm .17). Akhirnya, Jacob Lundborg akan memberikan solusi kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa antara Inggris dengan Spanyol tentang wilayah perairan sekitar Gibraltar. Jacob Lundborg menunjukkan bahwa klaim Spanyol umumnya tidak berdasar dan sebagai masalah hukum dan kebijakan, klaim Gibraltar ke perairan teritorialnya sendiri harus diakui dan dijunjung tinggi. Permasalahan hukum antara Spanyol dengan Inggris terkait Gibraltar yang dibawa ke tingkat Uni Eropa bukanlah masalah yang akan saya bahas dalam karya ilmiah yang akan saya lakukan, namun akan mendukung bahan yang akan saya cantumkan dalam karya tulis saya.

I.5.5 Gerry O'Reilly. 1999. *Gibraltar: Sovereignty Disputes And Territorial Waters*

Gerry O'Reilly menjelaskan tentang gesekan antara Spanyol dan Inggris yang terjadi sejak tahun 1997. Gesekan ini berkaitan dengan kapal penangkap ikan Spanyol yang masuk ke wilayah perairan Crown Colony of Gibraltar (CCG), pemerintah Inggris telah membuat kebijakan yang berkaitan dengan penyeberangan perbatasan antara Spanyol dan Gibraltar. Spanyol tidak menerima bahwa CCG memiliki setiap wilayah perairan. Seperti masalah CCG, sengketa kedaulatan regional lainnya adalah warisan dari organisasi geopolitik sejarah Selat Gibraltar ("Gibraltar: Sovereignty Disputes And Territorial Waters" 1999, hlm.1).

Gibraltar ditetapkan sebagai Crown Colony pada tahun 1830. Status ini telah diubah pada tahun 1950, ketika Dewan Legislatif dan Eksekutif diciptakan. Pada tahun 1964, Konstitusi Gibraltar diperkenalkan. Konstitusi Gibraltar diresmikan pada tahun 1969 penetapan bahwa status sovereign tidak akan berubah tanpa persetujuan rakyat Gibraltar. Sebagai pembalasan, Spanyol menutup perbatasan dengan Gibraltar dan memberlakukan larangan jalur penerbangan menerapkan blokade ekonomi yang berlangsung sampai tahun 1985. Sejak tahun 1950-an, lembaga-lembaga demokratis telah diperkenalkan dan telah ada beberapa partai politik. Inggris memberikan kewarganegaraan penuh kepada Gibraltarians pada tahun 1981. Namun, mengenai kewarganegaraan, itu adalah niat pemerintah Inggris ("Gibraltar: Sovereignty Disputes And Territorial Waters" 1999, hlm.5).

Selain itu proses diplomasi antara Inggris dengan Spanyol juga dibahas dalam buku ini seperti; Lisbon Agreement Spanyol-Inggris (1980) yang disediakan untuk memberikan pergerakan bebas bagi kendaraan dan barang antara Gibraltar dan Spanyol. Negosiasi ini juga bertujuan untuk mempromosikan pengembangan bagi kedua belah pihak bahwa "isu kedaulatan akan dibahas dalam proses." Meskipun kemunduran dalam hubungan Inggris Spanyol setelah Perjanjian Lisbon, sebuah Komunike Bersama dikeluarkan di Brussels pada tahun 1984, di mana kedua belah pihak setuju untuk menerapkan persyaratan Perjanjian Lisbon. Hal ini menyebabkan pembukaan perbatasan pada tahun 1995, namun diskusi substantif pada masalah

kedaulatan tidak terjadi (“Gibraltar: Sovereignty Disputes And Territorial Waters” 1999, hlm.5).

Dari sisi domestic, ampai pertengahan 1980-an, ekonomi Gibraltar telah mengalami perubahan pada sektor swasta ada peningkatan pariwisata melalui Costa del Sol, penyediaan jasa keuangan dan melalui sektor niche misalnya komunikasi satelit. Sektor keuangan Gibraltar diatur oleh Komisaris Jasa Keuangan yang melaporkan ke Komisi Keuangan Inggris dan Gibraltar senior. Pada bulan Maret 1997, Pemerintah Inggris memberikan izin Jasa Keuangan Komisi untuk 'paspor' (yaitu mengotorisasi) perusahaan asuransi Gibraltar untuk beroperasi di tempat lain di Wilayah Ekonomi Eropa. Undang-undang anti-pencucian uang dan semua kejahatan, mulai berlaku pada Gibraltar pada tahun 1996. Menurut Departemen Luar Negeri, undang-undang ini adalah standar Inggris dan Uni Eropa. Sementara mengenai perdagangan gelap, menurut pemerintah Inggris: Penyelundupan narkoba dari Maroko ke Spanyol, dengan menggunakan peluncuran cepat yang berbasis di Gibraltar dan penyelundupan tembakau langsung ke Spanyol, menjadi perhatian besar di pertengahan 1990-an. Perdagangan, terutama alkohol dan tembakau selalu menjadi bagian dari budaya lokal (“Gibraltar: Sovereignty Disputes And Territorial Waters” 1999, hlm.10).

Gerry O'Reilly menjelaskan tentang kedaulatan Gibraltar yang diperebutkan oleh Inggris dengan Spanyol, dengan keinginan rakyat Gibraltar di satu sisi. Selain itu Gerry O'Reilly juga menjelaskan tentang sengketa antara Spanyol dengan Maroko terkait wilayah Spanyol di Plaza. Maroko berpendapat bahwa jika Spanyol ingin mengambil wilayah Gibraltar sebagai bagian dari wilayahnya maka Marokopun memiliki alasan yang sama untuk mengambil wilayah Plaza dari tangan Spanyol. Selain itu juga penelitian Gerry O'Reilly memberikan gambaran tentang dampak keamanan sengketa wilayah antara Spanyol dengan Inggris dan Spanyol dengan Maroko bagi Selat Gibraltar.

I.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang penulis gunakan terdiri dari 3 konsep dan satu teori. Kerangka pemikiran ini memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Keempat kerangka pemikiran itu adalah sebagai berikut;

- a. Konsep Geopolitik
- b. Konsep Strategi Pertahanan
- c. Konsep *Deterrence*
- d. Teori Kebijakan Pertahanan

I.6.1 Konsep Geopolitik

Pengetahuan geografi sangat penting untuk analisis geopolitik. Geopolitik adalah tentang interaksi antara negara-negara dalam pengaturan geografis tertentu. Sepanjang sejarah, faktor geografi telah menjadi alasan konflik antar bangsa dan kerajaan. Geografi adalah faktor yang paling mendasar dalam politik internasional karena hal ini sifat dan bentuknya paling permanen. Geografi juga telah menjadi faktor terpenting bagi pemimpin suatu negara atau penguasa dalam proses pengambilan keputusan mereka baik itu dalam hal kebijakan luar negeri maupun kebijakan pertahanan (Francis P. Sempa 2002, hlm. 3). Sementara pemahaman Geopolitik dilihat sebagai bentuk dari distribusi geografis pada pusat sumber daya dan jalur Komunikasi yang memberikan nilai pada sebuah lokasi terhadap Kepentingan Strategis sebuah negara. Ada keuntungan yang didapat oleh sebuah negara dari kondisi geografis yang dia miliki.

Realitas geopolitiknya adalah bagaimana tindak lanjut terhadap Sumber daya ekonomi untuk kepentingan sebuah negara dan menjadi kebijakan luar negeri Negara tersebut. Seperti yang dikatakan Jakub J.Grygeil dalam bukunya *Great Powers and Geopolitical Change*, Definisi Singkat Geopolitik: “*geopolitics is an objective reality, independent of state wishes and interests, that is determined by routes and centers of resources*”. Selain itu Jakub J.Grygeil juga menulis bahwa: “*that in order to discover the geopolitical reality it is necessary to look at the location of resources*”.

(*distribution of power*) and the lines of communication linking them (Jakub J. Grygeil 2006, hlm.24).

Geopolitik digambarkan sebagai tempat dimana terdapat jalur komersial atau perdagangan, bentrokan militer dan pertukaran informasi yang mempengaruhi setiap aktor yang terlibat di dalamnya. Hal ini akan menjadi pemahaman mengenai realitas geopolitik yang akan memberikan perumusan kebijakan tentang geostrategis. Geopolitik pada akhirnya melahirkan kepentingan Politik, Ekonomi, dan Strategi. Dengan adanya Kepentingan Politik, Ekonomi, dan Strategi, maka Geopolitik akan menghasilkan korelasi antara Geografi – politik – Strategi agar negara yang berkepentingan tidak kehilangan Kontrol terhadap lokasi Sumber daya dan Jalur Komunikasi tersebut.

I.6.2 Konsep Strategi Pertahanan

Strategi dan tujuan politik sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Setiap strategi yang dibuat oleh sebuah negara pasti memiliki tujuan politik. Seperti yang didefenisi Colin Gray yang dikemukakan Clausewitz “*Strategy is the bridge the relates military power to political purpose*” (Colin. S.Gray 1999, hlm. 3). Clausewitz menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara kekuatan militer yang dikerahkan dengan tujuan Politik yang diinginkan oleh sebuah negara. Penggunaan kekuatan militer juga bukan hanya untuk tujuan politik dalam bentuk peperangan tetapi juga untuk mencegah terjadinya perang. Seperti yang diungkapkan oleh Bernard Brodie; “*selama ini tujuan utama penggunaan kekuatan militer adalah untuk memenangkan perang, namun saat ini tujuan utama penggunaan kekuatan militer adalah untuk mencegah terjadinya perang*” (AA Banyu Perwita dan Bantarto Bandoro. (Ed) 2012, hlm. 4). Jadi kekuatan militer saat ini dapat digunakan untuk memberikan efek ketakutan bagi musuh yang ingin melakukan konfrontasi militer dengan negara bersangkutan.

Strategi merupakan penghubung antara kekuatan militer dengan tujuan politik. Strategi digunakan untuk meraih setiap kepentingan yang diinginkan oleh sebuah negara. Strategi pertahanan menjadi kerangka konsep yang berguna bagi kekuatan militer untuk mencapai kepentingan politik yang diinginkan oleh negara. Strategi

mengatur bagaimana kekuatan militer digunakan dan diaplikasikan dalam situasi tertentu dengan kepentingan tertentu pula. Strategi pertahanan yang tepat bukan hanya dapat melindungi dan mempertahankan kepentingan sebuah negara tetapi juga dapat mencegah setiap ancaman yang datang.

I.6.3 Konsep Deterrence

Deterrence menurut Baylits, et.al (Baylits, Smith & Owens 2008, hlm.579) adalah “*the threat or use of force to prevent an actor from something they would otherwise do*” (AA Banyu Perwita dan Bantarto Bandoro. (Ed) 2012, hlm.4). *Deterrence* dapat memberikan efek psikologis bagi sebuah negara untuk melakukan tindakan ofensif atau tindakan mengancam. *Deterrence* telah lama dipraktekkan dalam sisten internasional baik sebagai aktor hegemon maupun secara kolektif. Misalnya, *balance of power* didasarkan pada *Deterrence* (penangkal), diterapkan oleh negara bukan hanya untuk mencegah perang, tetapi melalui perang. Banyak struktur alternatif, seperti sistem hegemonik, atau sistem keamanan kolektif memiliki tujuan *Deterrence*. *Power* yang dimiliki oleh satu negara atau secara kolektif (biasanya dalam aliansi) dapat menangkal serangan atau perilaku berbahaya dari aktor lainnya. *Deterrence* digunakan untuk menunjukkan konsekuensi berbahaya yang akan diterima oleh lawan yang berpotensi menjadi ancaman. *Deterrence* adalah praktek standar, seperti diplomasi atau mata-mata atau perang, dan dapat digunakan dalam strategi keamanan secara keseluruhan (“The State Of Deterrence In International Politics Today” 2012, hlm. 8). Tujuan *Deterrence* adalah untuk mempengaruhi keputusan musuh. *Deterrence* merupakan jalan penting dalam politik internasional.

Pemahaman mengenai *Deterrence* mulai berubah pada paruh pertama abad ke-20, *Deterrence* telah menjadi strategi yang penting bagi dunia internasional saat ini. *Deterrence* menjadi penting, karena dapat mencegah negara lain yang bisa menjadi keras dan agresif (“The State Of Deterrence In International Politics Today” 2012, hlm. 9). Saat ini negara menggunakan strategi *deterrence* dalam bentuk penggunaan senjata nuklir, aliansi, dan peningkatan kapabilitas pertahanan. Penggunaan senjata

nuklir, aliansi, dan peningkatan kapabilitas pertahanan dapat memberikan tekanan bagi musuh bahwa tindakan apapun akan berakibat fatal bagi dirinya sendiri.

I.6.4 Teori Kebijakan Pertahanan

Kebijakan pertahanan dan kekuatan pertahanan pada hakikatnya bekerja untuk kepentingan bangsa atau negara (Laura R. Cleary and Teri McConville. (Ed) 2006, hlm. 4). Kebijakan pertahanan ditujukan untuk melindungi dan juga sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Kekuatan pertahanan, dalam prakteknya jika cerdas digunakan dan terlatih, bisa menjadi kekuatan utama untuk tujuan politik yang lebih luas dari negara.

Carl von Clausewitz menyatakan bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Bahkan ketika kita tidak terlibat dalam perang, pemerintah sebuah negara harus menyadari bahwa pilihan pertahanan akan memiliki konsekuensi politik; *“Carl von Clausewitz declared that war was a continuation of politics by other means. Even when we are not engaged in war, politicians should be aware that the defence choices they make will have political consequences“* (Laura R. Cleary and Teri McConville. (Ed) 2006, hlm.39). Dua pertanyaan Kunci dari Kebijakan Pertahanan adalah apa yang kita bela, dan mengapa kita mempertahankannya? Kebijakan Pertahanan ini ada karena adanya kepentingan nasional dalam setiap negara, dimana menurut David Chuter mengatakan bahwa pembentukan kebijakan nasional adalah kepentingan nasional yang menjadi pelopor dari artikulasi Kebijakan Luar Negeri, keamanan dan pertahanan. Ketika, negara tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai kepentingan nasionalnya maka itu adalah suatu penyebab meningkatnya ketidakamanan (Laura R. Cleary and Teri McConville. (Ed) 2006, hlm. 33). Pada hakikatnya pemerintah dipilih untuk dapat membuat suatu sistem perumusan kebijakan dan bagaimana implementasinya. Bagian dari kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan Pertahanan dimana pemerintah mempertahankan kepentingan nasional negara tersebut.

Untuk menjalankan tugasnya, Pemerintah harus memiliki organisasi yang baik, karena negara dengan organisasi yang baik akan memiliki kebijakan pertahanan

dengan baik pula, contohnya seperti kepolisian, layanan penjara, layanan bea cukai, pelayanan kesehatan, serta guru, petugas pemadam kebakaran, dan sejumlah spesialis dan PNS yang akan membantu mempertahankan dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan tersebut. Bentuk-bentuk kekuatan pertahanan suatu negara adalah sebagai berikut:

Badan Eksekutif Negara, badan ini dapat merumuskan dan mengubah kebijakan dalam tindakan praktis. Mereka juga akan memberikan saran atau masukan tentang pembuatan kebijakan dan bersama dengan badan lain seperti badan legislatif secara bersama-sama merumuskan dan menetapkan sebuah kebijakan pertahanan (Laura R. Cleary and Teri McConville. (Ed) 2006, hlm .46). Kebijakan Pertahanan adalah suatu garis hirarki di dalam kebijakan pemerintah suatu negara, hirarki ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. *Government Policy*/Kebijakan Pemerintah: kebijakan ini bersifat Umum.
- b. *Foreign and Interior Policy*/Kebijakan Luar Negeri dan dalam negeri: pembagian dua arah kebijakan tersebut.
- c. *Security Policy*/Kebijakan Keamanan: diantaranya (Hubungan Politik-Militer dengan tetangga dan lain-lain, kebijakan terhadap organisasi-organisasi regional dan PBB, intelijen, kontrol senjata, non-proliferasi dan rezim perjanjian, penjaga perdamaian dan partisipasi dalam operasi multinasional).
- d. *Defense Policy*/Kebijakan Pertahanan. Kebijakan Pertahanan dapat diartikan bahwa suatu keamanan yang ingin dicapailah maka negara membutuhkan pertahanan dalam memproteksi kepentingan nasionalnya. Hal ini menjadi hirarki yang sederhana tapi bermanfaat.

Kebijakan pertahanan seperti yang digambarkan di atas bersifat umum dan tidak berdiri sendiri. Kebijakan pertahanan merupakan kolaborasi dari kebijakan-kebijakan lain yang dapat mendukung terciptanya keamanan bagi sebuah negara. Selain itu kebijakan pertahanan erat kaitannya dengan kebijakan luar negeri, karena setiap kebijakan pertahanan yang dikeluarkan oleh sebuah negara pasti berdampak

pada dunia internasional serta respon internasional baik aktor negara maupun non negara.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu proses penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu permasalahan yang terjadi dengan bantuan data pendukung dalam menjelaskan permasalahan tersebut.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*) guna mendapatkan data-data primer dan sekunder. Data primer adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan studi terhadap dokumen-dokumen resmi ditingkat nasional maupun internasional seperti buku Strategi pertahanan Inggris tahun 2012 atau buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui proses menganalisa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel dalam media internet serta data-data lainnya terkait dengan penelitian ini.

I.9 Sistematika Pembabakan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembabakan.

BAB II GEOPOLITIK INGGRIS DI GIBRALTAR

Bab ini menguraikan mengenai sejarah konflik panjang antara Inggris dengan Spanyol sebelum periode 2011-2014 dan juga konflik antara Inggris dengan Spanyol terkait Gibraltar saat periode 2011-2014. Bab ini juga akan membahas tentang Geopolitik Inggris di wilayah Gibraltar yaitu tentang letak Gibraltar secara geografis dan kontrol Inggris atas *chocke point* Selat Gibraltar.

BAB III STRATEGI PERTAHANAN INGGRIS DALAM MENGHADAPI SPANYOL DI GIBRALTAR

Bab ini berbicara mengenai Kebijakan Pertahanan Inggris dan Strategi Pertahanan Inggris, dalam menghadapi Spanyol di Gibraltar. Bab ini juga akan membahas tentang aliansi pertahanan Inggris dengan Amerika Serikat, yaitu kerjasama antara kedua negara dalam penggunaan fasilitas militer secara bersama-sama.

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bab terakhir dari penulisan karya ilmiah ini. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan analisis yang sudah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini juga berisi tentang saran yang akan diberikan kepada pemerintah Inggris dalam merumuskan kebijakan pertahanan maupun strategi pertahanannya dalam menghadapi Spanyol di Gibraltar.